

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Ketua Ombudsman RI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Mokhammad Najih

**PPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
JAKARTA RAYA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedy Irsan

Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih

Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA RAYA,

Mokhammad Najih

Dedy Irsan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
JAKARTA RAYA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	243 Laporan
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	12 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
1	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 350.681.000
2	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden	Rp 59.940.000
B	Pencegahan Maladministrasi	
1	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp 126.888.000
II	Dukungan Manajemen	
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
1	Layanan Perkantoran	Rp 299.730.000
	Total	Rp 837.239.000

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA RAYA,

Dedy Irsan



**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
JAKARTA RAYA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	243 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Laporan yang dimaksud adalah laporan masyarakat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 di tahap PVL yang tidak memenuhi syarat materil (tidak termasuk penutupan karena tidak memenuhi syarat formil) dan tahap pemeriksaan. Laporan yang diselesaikan merupakan penyelesaian (penutupan) laporan yang ditangani pada tahun	Data SIMPeL	Dihitung dengan menjumlahkan seluruh laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>). $\sum LMS = LMS_1 + LMS_2 + \dots + LMS_n$ $\sum LMS$: Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) LMS : Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>).		diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>).
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Laporan yang dimaksud adalah laporan pengawasan Ombudsman melalui investigasi atas prakarsa sendiri pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.	Laporan IAPS	Dihitung berdasarkan jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	12 Pemerintah Daerah	Merupakan keluaran atas kegiatan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah.	Laporan Hasil Penilaian Opini	Dihitung dengan menjumlah seluruh Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini.		$\sum PDOP = PDOP_1 + PDOP_2 + \dots + PDOP_n$ $\sum PDOP$: Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik $PDOP$: Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	Merupakan keluaran atas kegiatan layanan perkantoran untuk memastikan operasional dan pemeliharaan kantor dapat terpenuhi selama 1 tahun.	Data penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Dihitung berdasarkan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan yang diberikan